

SOCIAL ENTERPRISE BERBASIS EKONOMI PROTEKSI

Muhammad Fakhri Al-Kahfi¹

¹Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

ABSTRAK

Permasalahan sosial terutama kemiskinan seakan menjadi pekerjaan rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencoba menyelesaikan permasalahan sosial seakan tidak memberikan dampak yang signifikan. Salah satu terobosan luar biasa dalam usaha menyelesaikan permasalahan sosial adalah social enterprise atau kewirausahaan sosial, social enterprise merupakan sebuah bentuk usaha yang menargetkan penyelesaian permasalahan sosial dari pada mencoba mengumpulkan keuntungan. Tetapi selayaknya usaha pada umumnya social enterprise memiliki potensi kegagalan dalam kegiatannya yang disebabkan oleh kegagalan manajerial dan kegagalan finansial, salah satu cara untuk menghindari kegagalan usaha adalah dengan kebijakan ekonomi proteksi, ekonomi proteksi merupakan sebuah kebijakan untuk menjaga sebuah usaha dari persaingan dan juga kegagalan finansial maupun manajerial dan juga meningkatkan produk dan perdagangan suatu usaha. Penelitian ini menggunakan metode literature review yaitu menelaah penelitian-penelitian yang ada untuk menemukan konsep masing-masing variable dan mengkajinya sehingga menciptakan konsep baru. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi baru kepada pihak terkait dalam penerapan social enterprise.

Kata kunci: permasalahan sosial, kemiskinan, finansial, social enterprise, ekonomi proteksi

ABSTRACT

Social problems, especially poverty, seem to be difficult domestic work to solve, various policies issued by the government that try to solve social problems do not seem to have a significant impact. One of the extraordinary breakthroughs in solving social problems is social enterprise or social entrepreneurship, social enterprise is a form of business that targets the resolution of social problems rather than trying to collect profits. But just as business in general social enterprise has the potential for failure in its activities caused by managerial failures and financial failures, one way to avoid business failure is a protection economic policy, a protection economy is a policy to keep a business from competition and also financial failure and managerial and also improve the product and trade of a business. This research uses the literature review method, which is examining existing research to find the concepts of each variable and study them so as to create new concepts. The purpose and benefits of this research are to provide new references to related parties in the implementation of social enterprise.

Keywords: social problems, poverty, financial, social enterprise, economic protection

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang tak ada habisnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangnya belum memberikan dampak yang signifikan untuk menghilangkan

kemiskinan walaupun dalam hitungan angka berkurang tetapi kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam perekonomian yang menuntut penyelesaian dengan cermat dan bijak. Kemiskinan bukan hanya disebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki

oleh masyarakat dan juga minimnya kemampuan yang dimiliki, penyebab lainnya adalah kurangnya kemauan untuk mengembangkan sumber daya yang tersedia dan menggunakannya seefektif mungkin untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa kebijakan pemerintah yang berusaha mengentaskan kemiskinan justru menjadi boomerang bagi pemerintah dan juga memperparah keadaan, sebagai contoh adalah program Bantuan langsung Tunai (BLT) dimana pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang dianggap pantas menerima bantuan tersebut dengan harapan perekonomian masyarakat miskin dapat terbantu sehingga taraf hidup mereka meningkat, tetapi fakta yang terjadi adalah walaupun masyarakat terbantu secara finansial ketika mendapatka bantuan tersebut tetapi dikarenakan bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga setelah bantuan habis masyarakat kembali ke keadaan sebelumnya. Lebih parah lagi, dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah menimbulkan mental yang tidak baik bagi masyarakat sehingga masyarakat selalu mengandalkan bantuan tersebut untuk bertahan hidup dan enggan untuk berinovasi untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Dewasa ini timbul sebuah gagasan yang berusaha meyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan cara mendirikan kewirausahaan sosial atau Social enterprise. Social enterprise merupakan sebuah pembaharuan yang luar biasa mengingat biasanya sebuah wirausaha hanya berorientasi kepada keuntungan sedangkan social enterprise walaupun merupakan sebuah usaha tetapi tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan melainkan menitik beratkan kepada penyelesaian masalah sosial terutama permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat (Firdaus, 2014). Social enterprise merupakan sebuah gagasan yang berdasarkan inovasi dan kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif mungkin dan mengembangkannya sehingga mendatangkan keuntungan (Listyorini, 2012). Pendekatan kewirausahaan sosial atau social enterprise

berdasarkan kepada kepercayaan bahwasanya kegiatan kewirausahaan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Noruzi, Westover, & Rahimi, 2010). Keyakinan ini pun terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menjadi wirausaha

Social enterprise dalam prakteknya memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan. Social enterprise didasarkan oleh kesadaran seorang atau sekelompok masyarakat yang melihat permasalahan yang timbul di masyarakat dan menimbulkan solusi-solusi untuk mencoba menyelesaikannya sehingga social enterprise tidak menitik beratkan pada keuntungan. Walaupun social enterprise tidak berorientasi kepada keuntungan bukan berarti social enterprise tidak dapat menghasilkan keuntungan. Dalam hakikatnya social enterprise merupakan sebuah usaha jangka panjang karena manfaat yang dihasilkan dari social enterprise tidak mungkin dirasakan secara langsung melainkan memerlukan proses dan waktu yang lama (Aisyianita, 2017).

Social enterprise dalam perjalanannya tidak lepas dari kegagalan disamping adanya kesuksesan dalam pelaksanaannya, beberapa dari social enterprise mengalami kegagalan dalam perjalanannya. Kegagalan dari social enterprise selain dikarenakan kurang baiknya manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut juga dapat dikibatkan oleh hal lain, keterbatasan finansial merupakan salah satu sebab terbesar yang mengakibatkan kegagalan dari social enterprise (Ghina, 2015), hal ini merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di sebuah usaha. Kegagalan finansial di social enterprise bisa disebabkan oleh produk yang tidak berkualitas, adanya produk sama yang menjadi pesaing dari produk yang diproduksi oleh social enterprise, ataupun daya serap masyarakat terhadap produk dari social enterprise yang minim sehingga tidak mendatangkan keuntungan (Firmansyah & Hendra, 2015).

Salah satu cara yang dianggap dapat menjaga keberlangsungan dari dari

social enterprise adalah dengan konsep ekonomi proteksi. Ekonomi proteksi adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka melindungi bahkan meningkatkan perekonomian dengan cara mengoptimalkan produk dan juga usaha (Kartika, 2010). Proteksi ekonomi merupakan suatu keharusan untuk menjaga finansial dalam suatu usaha dan juga ekonomi proteksi dapat melakukan spesialisasi produksi yang memiliki keunggulan komparatif dan mengeliminasi produk yang tidak memiliki keunggulan (Sabaruddin, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengetahui konsep dasar di setiap variable nya dan menjadikannya landasan dasar untuk menciptakan konsep baru. Penelitian ini memberikan referensi baru pada pelaksanaan social enterprise untuk menjaga keberlanjutannya dengan konsep baru yaitu social enterprise berbasis ekonomi proteksi.

2. SOCIAL ENTERPRISE

Social enterprise memiliki beragam macam pengertian di dalam nya, social enterprise dapat dikatakan sebagai perusahaan non profit, sektor sosial dan lain sebagainya. Social enterprise merupakan turunan dari entrepreneurship itu sendiri sebagai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan tetapi memiliki tujuan lebih besar yaitu menyelesaikan permasalahan sosial. Social enterprise adalah kegiatan ekonomi dengan bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat terkait dengan maksud penciptaan nilai sosial (Hulgard, 2010). Social entrepreneur merupakan seorang agen perubahan yang memiliki cita cita untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Seorang social entrepreneur selalu berinovasi dalam bekerja dan juga berani bertindak dan mempertanggung jawabkan nya terhadap masyarakat (Sofia, 2015)

Social enterprise dalam kegiatannya tidak dapat berjalan sendiri karena pada hakikatnya kegiatan bisnis yang dimiliki oleh social enterprise bermula dari keterbatasan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki sehingga diperlukan kemitraaan dengan sektor swasta maupun organisasi untuk

menciptakan pertumbuhan perekonomian yang efektif (Firdaus, 2014).

Berdasarkan uraian di atas social enterprise terdiri dari empat elemen utama yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity (Palesangi, 2012). Adapaun empat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Social Value*. Merupakan elemen yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan lainnya, elemen ini mendorong usaha tersebut untuk selalu menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi kehidupan sosial.
- *Civil Society*. Pada dasarnya kewirausahaan sosial dalam kegiatannya bergantung kepada partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.
- *Innovation*. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sebuah social enterprise diharuskan untuk selalu melakukan inovasi dalam berusaha agar tercapai keberlanjutan dan dapat bertahan dengan sumber daya yang minim.
- *Economic Activity*. Demi keberhasilan dari kewirausahaan sosial maka kegiatan ekonomi dan kegiatan haruslah seimbang karena kegiatan ekonomi menjadi kunci dari keberlanjutan kegiatan sosial, dan kegiatan sosial menjadi kunci dari tujuan dari pendirian kewirausahaan sosial.

Inovasi sosial menjadi kunci dari keberhasilan suatu kewirausahaan sosial, keahlian melihat peluang dari permasalahan yang ada merupakan kunci dalam menjalankan kegiatan usaha. dalam menciptakan ide usaha, social enterprise dapat melihat dari permasalahan sosial yang ada disekitar masyarakat, hal itu lah yang menjadi perbedaan mendasar dari kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan lainnya. Seorang wirausaha sosial haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap peluang dan menciptakan inovasi yang tepat (Sofia, 2015).

Sebuah wirausaha diharapkan dapat berdiri berkelanjutan untuk memenuhi tujuan pendiriannya, begitupun dengan

social enterprise diharapkan dapat berdiri secara sustainable secara finansial dan kelembagaan. Keberlanjutan dari social enterprise dapat dicapai dengan kemitraan dengan institusi publik dan juga kemitraan dengan korporasi (Palesangi, 2012).

- Kemitraan dengan Institusi Publik
Untuk menjaga keberlangsungan, social enterprise dapat melakukan kemitraan dengan institusi publik yang memiliki visi dan misi yang sama yaitu menyelesaikan permasalahan sosial.

- Kemitraan dengan Korporasi
Konsep kewirausahaan sosial memiliki konsep yang sama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berusaha menghubungkan motif ekonomi dengan motif sosial dan mengupayakan manfaat bagi sosial dalam setiap usaha yang dijalankan.

Dengan pola kemitraan dengan institusi publik yang memiliki visi dan misi yang sama dengan *social enterprise* dan juga kemitraan dengan korporasi diharapkan *social enterprise* dapat berdiri secara berkelanjutan secara finansial dan juga dapat meningkatkan manajemen.

Di dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis praktik atau model dari kewirausahaan sosial (Primantoro, 2005), yaitu:

- a. Kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran. Kewirausahaan sosial ini sengaja didirikan untuk membantu masyarakat yang menjadi target sasaran dan juga memiliki usaha yang sesuai dengan dengan permasalahan yang ada.
- b. Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasarannya. Model ini biasanya bersifat kerjasama antara perusahaan dengan target sasaran sehingga saling menguntungkan.
- c. Kewirausahaan yang tumbuh dari kelompok sasaran. Model usaha ini biasanya tumbuh dari masyarakat sendiri yang mencoba mencari peluang dan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.

Sebagai sesuatu yang berbeda dari kewirausahaan pada umumnya. Kewirausahaan memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan lainnya (widiastuti & Margaretha, 2011), yaitu:

- a. Orang-orang yang menjalankan *social enterprise* mempunyai visi dan misi untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan gagasan-gagasan yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Pada umumnya pendiri *social enterprise* berasal dari kalangan masyarakat yang tidak terkenal atau dari lingkungan permasalahan itu sendiri.
- c. Orang-orang memiliki daya transformatif yaitu mampu menciptakan gagasan baru dalam menghadapi permasalahan, selain itu memiliki ketangguhan dan kesungguhan dalam menghadapi tantangan.
- d. Orang-orang yang bekerja pada *social enterprise* mampu memotivasi kinerja masyarakat, memperbaiki dan juga meningkatkannya.
- e. Melakukan perubahan secara sistemik dengan merubah perilaku dan pemahaman masyarakat.
- f. Pemecah masalah dengan kreatif.
- g. Mampu mengembangkan usaha dan menjangkau lebih luas dengan sumber daya yang sedikit dan terbatas, dengan keberanian untuk mengambil resiko.
- h. Tidak bisa diam dalam berusaha, selalu mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik.
- i. Selalu menemukan hal-hal baru dalam organisasi sehingga tidak terpaku pada model lama.
- j. Bebas dan independen sehingga lebih efektif dan produktif dalam usaha.

Menjadi *social entrepreneur* bukan lah suatu hal yang mudah, tantangan yang dihadapi utamanya adalah tantangan dari masyarakat sosial yang menjadi target utama dari *social enterprise*. Dalam menjalankan konsep usaha yang ditujukan kepada masyarakat tentunya akan menghadapi penolakan dari masyarakat yang tidak sepemahaman dengan konsep usaha tersebut. Penolakan tersebut berasal dari mindset yang berpegang teguh pada keyakinan yang sudah ada dalam masyarakat dan cenderung enggan mengambil resiko, oleh karena itu seorang *social entrepreneur* haruslah menghasilkan banyak solusi untuk berusaha

mengubah cara pandang masyarakat terhadap *social enterprise* (Said & Amiruddin, 2016).

Selain tantangan mindset masyarakat yang sulit untuk berubah, *social enterprise* menghadapi permasalahan lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan. Permasalahan finansial menjadi salah satu permasalahan terbesar di *social enterprise* sehingga banyak yang membutuhkan *Social Investor* untuk menjaga keberlanjutan usaha (Kusumah, 2011). Lebih lanjut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh *social enterprise* (Nicholls, 2006), antara lain:

1. *Leadership*, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Visi, Pemimpin harus selalu mengedepankan visi sosial yang menjadi jiwa perusahaan.
 - b. Legitimasi, pemimpin diharuskan menciptakan lingkungan yang kondusif agar tujuan sosial perusahaan dapat tercapai.
 - c. Pemberdayaan. Pemimpin harus bersifat terbuka kepada para pekerja lainnya dalam mengambil keputusan sehingga memiliki sumber daya manusia yang berdaya
2. *Strategy*, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. *Alignment*, segala sesuatu yang ada di perusahaan harus berjalan beriringan dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
 - b. *Leveraging core competencies*, fokus terhadap kegiatan kreatif dan inovatif dalam menyebarkan produk perusahaan sehingga dapat mencapai keberhasilan.
 - c. *Partnering*, bermitra dan beraliansi dengan perusahaan lain yang memiliki inovasi yang sejalan dengan *social enterprise*.
3. *Structure*, struktur manajemen yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Diharapkan *social enterprise* dapat menciptakan organisasi yang inovatif untuk efektivitas perusahaan.
4. *System*, sistem yang ada di *social enterprise* haruslah sejalan dengan

tujuan sehingga tercipta sistem yang:

- a. Meningkatkan pembelajaran bagi para pembuat keputusan untuk selalu berbenah dan menciptakan keputusan yang tepat.
- b. Memungkinkan eksekusi keputusan yang tepat.

3. EKONOMI PROTEKSI

Ekonomi proteksi merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membendung arus globalisasi ekonomi yang mengancam perekonomian suatu usaha dan bangsa. Globalisasi diawali dengan bangkitnya perdagangan bebas antar negara, globalisasi sendiri memiliki beberapa bentuk (Minarsih, 2012), antara lain:

- a. Globalisasi produksi
Globalisasi produksi ditandai dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi barangnya diberbagai negara agar biaya produksi menjadi murah, hal ini dikarenakan upah buruh yang murah, biaya bea masuk yang murah, dan infrastruktur yang memadai.
- b. Globalisasi pembiayaan
Globalisasi pembiayaan ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mendapatkan kemudahan untuk akses modal berupa pinjaman dan investasi dari berbagai negara di dunia.
- c. Globalisasi tenaga kerja
Adanya globalisasi membuka peluang bagi para tenaga kerja yang tidak dapat terserap di negaranya agar dapat mencari kerja di negara lain, selain itu para ahli pun dapat mencari kerja di negara lain dengan motif mencari keuntungan yang lebih besar.
- d. Globalisasi jaringan informasi
Globalisasi memudahkan pertukaran informasi antar negara sehingga negara dapat bersiap untuk menghadapi tantangan global.
- e. Globalisasi perdagangan
Globalisasi menuntut padaa penurunan dan penyeragaman harga produk dan penghapusan hambatan dalam perdagangan dengan harapan perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan cepat.
Globalisasi tidak selalu memberikan dampak positif kepada para pelaku ekonomi, dampak positif dari globalisasi bagi perusahaan yang sudah siap

menghadapinya dalam majunya usaha yang dijalankan, selain itu perdagangan dari usaha tersebut dapat mencapai pasar internasional. Selain itu terdapat berbagai dampak negative bagi perusahaan yang belum siap menghadapi arus globalisasi seperti persaingan dengan perusahaan yang lebih besar, kualitas produk yang masih kalah dengan produk lainnya dan sejenis dan juga beralihnya daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri.

Globalisasi menuntun kepada pasar bebas dengan tidak memperhatikan situasi perekonomian negara yang kadang belum siap menghadapi globalisasi tersebut. Sistem pasar bebas dipaksakan agar menjadi hukum baru dalam perekonomian internasional. Hal ini tentunya adalah ancaman bagi negara dan perusahaan berkembang yang memiliki sumberdaya yang minim, infrastruktur ekonomi yang belum mendukung dan juga kepastian usaha yang belum jelas, sehingga ujungnya globalisasi mengarahkan perusahaan kearah liberalisasi ekonomi dan privatisasi (swastanisasi) dimana perusahaan sepenuhnya dikontrol pemilik modal tanpa adanya campur tangan masyarakat yangharusnya menjadi target peningkatan perekonomian (Firmansyah & Hendra, 2015).

Ekonomi proteksi adalah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka melindungi dan meningkatkan sistem ekonomi dengan mengoptimalkan manajemen maupun produk dalam suatu perusahaan (Kartika, 2010). Ekonomi proteksi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan suatu perusahaan dengan menjaga perusahaan tersebut dari permasalahan-permasalahan dalam produk, manajemen, maupun perdagangan yang diakibatkan oleh persaingan diluar perusahaan tersebut. Kebijakan ekonomi proteksi berhasil meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus produsen secara signifikan dan mengurangi jumlah permintaan dari barang impor atau barang sejenis diluar perusahaan (Hadi & Nuryanti, 2005).

Pada umumnya ekonomi proteksi memiliki beberapa bentuk antara lain:

1. Tarif barrier, yaitu tindakan dengan cara memberikan tariff bea yang tinggi kepada barang industri impor yang masuk.
2. Bounties payment, yaitu tindakan dengan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri dengan harapan harga jual produk dalam negeri dapat terjangkau oleh masyarakat.
3. Non tariff barrier, sebuah tindakan, peraturan seperti melarang impor, pembatasan impor dan lainnya.
4. Bantuan biaya research and development, yaitu bantuan dalam penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Kebijakan harga dan perdagangan merupakan salah satu kebijakan yang umumnya bertujuan untuk memelihara produsen dan juga konsumen, kebijakan harga akan memberikan dampak kepada produsen yaitu menciptakan pasar terhadap produk yang di produksi dan juga menjaga para produsen dari potensi kerugian. Bagi konsumen kebijakan harga dan perdagangan akan memberikan kenyamanan bagi mereka dari monopoli harga yang dilakukan oleh produsen yang tak bertanggung jawab (Mardianto & Ariani, 2004). Kebijakan harga dan perdagangan juga akan meningkatkan rasa saling percaya antar produsen, konsumen, dan juga pembuat kebijakan dalam hal ekonomi. Selain bentuk-bentuk proteksi yang disebut, ekonomi proteksi menjaga kestabilan dan keberlanjutan suatu usaha dengan melakukan sedikit tindakan persuasif kepada masyarakat untuk menggunakan produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir terhadap pasar yang akan menyerap produk yang dihasilkan karena produk yang dihasilkan sudah pasti akan diserap oleh pasar (Satya, 2016). Selain itu kebijakan ekonomi proteksi juga akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal, selain itu produk yang diserap oleh pasar akan menimbulkan peningkatan kualitas secara berkala sebuah produk agar dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen.

Aterdapat dua alasan utama mengapa suatu perusahaan diharapkan

menerapkan ekonomi proteksi adalah (Kartika, 2010):

1. Alasan *infant industry*

Infant industry merupakan suatu alasan untuk melindungi suatu usaha agar dapat tumbuh dan berkembang.

2. Alasan strategi

Adalah suatu alasan agar suatu usaha dapat memproduksi dan menciptakan pasar produk yang diproduksi.

4. SOCIAL ENTERPRISE BERBASIS EKONOMI PROTEKSI

Sebagai sebuah perusahaan *social enterprise* dituntut agar dapat terus berdiri tegak dan berkembang agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sosial dan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Menjadi perusahaan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan demi tercapainya tujuan perusahaan (Palesangi, 2012). *Social enterprise* merupakan salah satu bentuk wirausaha yang menekankan kepada inovasi dan kreatif dalam pelaksanaannya. Inovasi dan kreativitas sangat diperlukan mengingat permasalahan sosial yang selalu muncul dan bersifat kompleks. *Social enterprise* dituntut dapat memberikan penyelesaian yang baik dan tepat agar dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Kewirausahaan sosial atau *social enterprise* dianggap mampu mementaskan permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan yang ada di masyarakat (Firdaus, 2014), hal ini dikarenakan *social enterprise* mencoba menyelesaikan permasalahan bukan dengan cara memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang justru akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat tanpa diikuti dengan kemampuan produksi, *social enterprise* memberikan jalan keluar dari permasalahan dengan cara meningkatkan kemampuan produksi masyarakat dan juga mengalokasikan keuntungan untuk program bantuan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan seimbang dengan meningkatnya kemampuan produksi dan kemampuan diri mereka sehingga penyelesaian permasalahan bersifat berkelanjutan.

Keberhasilan yang dicapai oleh *social enterprise* tidak serta merta membuatnya terhindar dari kemungkinan kegagalan, *social enterprise* banyak mengalami kegagalan yang disebabkan oleh buruknya manajemen dan juga kegagalan dari aspek finansial (Ghina, 2015). Kegagalan ini secepatnya harus diselesaikan mengingat *social enterprise* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelesaian permasalahan sosial sehingga apabila kegagalan ini tidak diperhatikan akan menghambat proses penyelesaian permasalahan sosial.

Salah satu tindakan yang dianggap tepat dalam meminimalisir kegagalan finansial yang ada di *social enterprise* adalah dengan penerapan konsep ekonomi proteksi, praktik ekonomi proteksi berhasil menjaga kestabilan perusahaan dengan cara menguatkan perdagangan, perlindungan dari usaha sejenis, dan manajemen pasar yang baik (Kartika, 2010). Penerapan ekonomi proteksi dalam *social enterprise* memiliki beberapa bentuk antara lain:

a. Menciptakan usaha milik masyarakat.

Untuk memaksimalkan dampak sosial bagi masyarakat, *social enterprise* memerlukan partisipasi masyarakat secara pasif sehingga memudahkan proses penyelesaian permasalahan sosial dan juga menjaga agar dampak sosial yang dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan. *Social enterprise* tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai pekerja dalam perusahaan tetapi dapat memfasilitasi mereka untuk menciptakan usaha mereka masing-masing dengan konsep *join venture* atau kerjasama dimana *social enterprise* memberikan bantuan yang diinginkan dan usaha baru akan membagi keuntungan (Mardianto & Ariani, 2004). Menciptakan usaha milik masyarakat adalah bentuk proteksi bagi *social enterprise* dalam hal finansial sehingga *social enterprise* tidak hanya bergantung kepada usaha yang dijalankannya untuk memberikan bantuan sosial, karena *social enterprise* juga akan mendapatkan bagi hasil keuntungan dari usaha masyarakat yang bekerjasama dengan *social enterprise*, selain itu proses penyelesaian permasalahan

sosial akan lebih ringan mengingat masyarakat sudah memiliki usahanya sendiri.

b. Perlindungan usaha masyarakat.

Setelah usaha milik masyarakat sudah berkembang dengan baik dan mendatangkan keuntungan baik kepada *social enterprise* maupun kepada masyarakat, *social enterprise* diharuskan memberikan perlindungan kepada usaha milik masyarakat itu sendiri. Perlindungan usaha milik masyarakat oleh *social enterprise* antara lain sebagai berikut:

a) Meniadakan persaingan usaha sejenis.

Banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu persaingan antara usaha sejenis dan menimbulkan persaingan harga dan produk yang berdampak kepada bangkrutnya suatu usaha. Untuk menghindari hal tersebut maka *social enterprise* haruslah memberikan edukasi terhadap bahayanya usaha sejenis dengan cara memberikan wadah usaha bersama bagi usaha sejenis sehingga sebuah usaha tidak memiliki pesaing yang sejenis. Wadah usaha ini akan memberikan dampak positif karena dua atau lebih usaha sejenis akan bekerja dalam satu usaha dan juga akan dapat saling melengkapi sehingga keuntungan akan lebih maksimal.

b) Meminimalisir masuknya produk selain produk *social enterprise*.

Salah satu penyebab gagalnya suatu usaha adalah masuknya produk dari luar usaha tersebut yang menawarkan barang yang sejenis, walaupun barang tersebut dijual dengan harga murah atau bahkan memiliki kualitas lebih baik tentunya hal ini apabila dibiarkan akan memberikan dampak negative kepada pertumbuhan usaha. Untuk menjaga keberlanjutan usaha di *social enterprise* maka meminimalisir produk dari luar *social enterprise* menjadi keharusan, selain untuk menjaga usaha, kebijakan ini bermaksud untuk menjamin agar produk yang dihasilkan oleh *social enterprise* dapat terserap oleh pasar yang juga merupakan masyarakat yang menjadi target dari *social enterprise* itu sendiri.

c. Menciptakan pasar bagi produk *social enterprise*

Sebuah usaha selain harus memikirkan kualitas produk juga harus memikirkan pasar mana yang akan menjadi target sasaran dari produknya. Produk yang biasanya ditawarkan oleh *social enterprise* adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat karena *social enterprise* dalam usahanya baik *input* maupun *output* nya adalah berorientasi sosial. Untuk menjamin agar produk yang di produksi oleh *social enterprise* maka haruslah dilakukan segmentasi pasar dan pasar yang potensial adalah masyarakat sasaran dari *social enterprise* itu sendiri. Sehingga setiap produk yang dikeluarkan oleh *social enterprise* dapat langsung diserap oleh pasar dan mendatangkan keuntungan untuk kebutuhan operasional maupun kegiatan sosial.

Kebijakan menciptakan usaha masyarakat, perlindungan kepada usaha masyarakat, dan juga menciptakan pasar bagi produk *social enterprise* merupakan sebuah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan dari *social enterprise* dan menjaganya dari kegagalan finansial maupun kegagalan manajerial sehingga proses penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan oleh *social enterprise* tidak terhambat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan menjadi penyakit laten yang sulit untuk diselesaikan dengan metode konvensional, dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dibutuhkan sebuah gerakan yang berbeda dan inovatif. Salah satu gerakan inovatif alam berusaha menyelesaikan permasalahan kemiskinan adalah dengan menciptakan *social enterprise*. *Social enterprise* adalah suatu bentuk dari kewirausahaan yang tidak berorientasi kepada keuntungan, melainkan berorientasi kepada penyelesaian permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial dianggap dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan sosial dengan asumsi bahwa sebuah kewirausahaan dapat memberikan kekuatan finansial kepada para pelaku dan terdampak dari *social enterprise* tersebut.

Layaknya sebuah usaha pada umumnya, sebuah *social enterprise*

tidak lepas dari baying-bayang kegagalan, kegagalan dalam sebuah usaha tidak terkecuali kewirausahaan sosial bersumber dari kegagalan manajerial dan juga kegagalan finansial. Salah satu metode yang dapat meminimalisir tingkat kegagalan suatu usaha adalah dengan ekonomi proteksi, ekonomi proteksi akan memberikan perlindungan kepada sebuah usaha dengan memberikan kebijakan-kebijakan dalam hal produk, perdagangan dan lainnya. *Social enterprise* berbasis ekonomi proteksi memberikan kebijakan baru dalam kegiatannya antara lain menciptakan usaha masyarakat, memberikan perlindungan terhadap usaha masyarakat, dan menciptakan pasar bagi produk dari *social enterprise* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyianita, R. A. (2017). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D.I. Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship). *Jurnal Media Wisata, Vol 15, No 2*.
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1*.
- Firmansyah, H., & Hendra, E. (2015). Implikasi Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas Terhadap Stabilitas Nilai Rupiah. *Asy-Syari'ah, Vol 17. No 1*.
- Ghina, A. (2015). Analisis Penerapan Social Bricolage di Social Enterprise. *e-Proceeding of Management, Vol 2, No. 1*.
- Hadi, P., & Nuryanti, S. (2005). Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi, Vol 23. No. 1*.
- Hulgard, L. (2010). Discourse of Social Entrepreneurship-Variation of The same Theme. *EMES European Research Network*.
- Kartika, M. M. (2010). Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008.
- Kusumah. (2011). *Social-entrepreneurship: Membangun Negara dan Mensejahterakan Bangsa*. Retrieved February 13, 2011, from [http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2011/02/13/social-entrepreneurship-](http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2011/02/13/social-entrepreneurship-membangun-negara-dan-mensejahterakan-bangsa/)
- membangun-negara-dan-mensejahterakan-bangsa/.
- Listyorini, H. (2012). Komponen dan Dampak Sosial Entrepreneurship Dalam Upaya Revitalisasi Budaya dan Industri Batik Lasem Kabupaten Rembang. *Jurnal Dinamika kepariwisataan Vol. XI, No. 2*.
- Mardianto, S., & Ariani, M. (2004). Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditas Beras di Asia dan Prospek Pengembangannya di Indonesia. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian AKP, Vol 2. No. 4*.
- Minarsih, M. M. (2012). Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional Serta Tantangannya di Era Globalisasi. *Paper*.
- Nicholls, A. (2006). Playing the Field: A New Approach to the Meaning of Social Entrepreneurship. *Social Enterprise Journal*.
- Noruzi, Westover, & Rahimi. (2010). An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era. *Asian Social Science*.
- Palesangi, M. (2012). Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum*.
- Primantoro, A. (2005). Supporting Organization Mission Trough Social Entrepreneurship: General Trend on Indonesian Social Entrepreneurship. *Paper*.
- Sabaruddin, S. S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 17, No. 4*.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. (2016). Social Entrepreneurship: Initiative Efforts from Higher Education Classroom. *Proceeding of the International Conference on University-Community Engagement*.
- Satya, A. (2016, Desember 7). *Ekonomi Proteksi Sebagai Salah Satu Solusi Peningkatan Ekonomi Daerah*. Retrieved Juni Jum'at, 2018, from <https://andikasatya687.wordpress.com/2016/12/07/ekonomi-proteksi-sebagai-salah-satu-solusi-peningkatan-ekonomi-daerahessay/>
- Sofia, I. P. (2015). Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social

Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. *Jurnal Universitas Pembangunan jaya #2, Vol 2.*

widiastuti, R., & Margaretha, M. (2011). Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Perannya Bagi Masyarakat. *jurnal Manajemen, Vol 11. No. 1.*